







N<sup>o</sup> 26a

1873

## BUITENGEWOON NUMMER

DER

## JAVASCHE COURANT



OFFICIEEL NIEUWSBLAD

De prijs van intekening op deze COURANT  
is / 25.— voor een jaar.  
/ 12.50 voor een half jaar.

De prijs der ADVERTENTIEËN is 50 Cent voor  
elke vijf woorden of daar beneden, buiten  
de zegelgelden en briefportien.

DONDERDAG 3 APRIL

## NEDERLANDSCH-INDIË.

Batavia. — Van den Gouvernements Kommissaris voor *Atjeh*, den Vice-President van den Raad van *Nederlandsch-Indië*, P. N. Nieuwen-Auijzen, is, via *Penang*, per telegram het bericht ontvangen, dat hij den 22sten Maart jl. voor *Atjeh* is aangekomen en, na tot tweemaal toe aan den Sultan, onder voorhouding der tegen hem bestaande grieven, omtrent zijn verraderlijk gedrag, te vergeefs opheldering te hebben gevraagd, den 26sten Maart, bij het navolgend manifest, hem den oorlog verklaard heeft.

De Kommissaris van het Gouvernement van *Nederlandsch-Indië* voor *Atjeh*:

Overwegende:

dat op het Gouvernement van *Nederlandsch-Indië* de verplichting rust, om de algemeene belangen van handel en scheepvaart in den *Oost-Indischen archipel* tegen belemmeringen te beveiligen;

dat die belangen door de onderlinge geschillen en vijandelijkheden der aan het rijk van *Atjeh* onderhoorige staatjes, waarvan enkelen bij herhaling de bescherming van het *Nederlandsch-Indisch* Gouvernement hebben ingeroepen, bij voortdoring zijn geschaad;

dat de herhaalde verzoogen van de zijde van dat Gouvernement, om aan zoodanigen toestand een einde te maken, en eene goed bevestigde verstandhouding van *Atjeh* tot hetzelfde in het leven te roepen, steeds zijn afgestuit op den onwil en de volslagen onverschilligheid van de bestuurders van gemeld rijk, en op huane magtelooheid, om in de onderhoorigheden van *Atjeh* de rust en orde naar eisch te handhaven;

dat die pogingen onlangs zelfs zijn beantwoord met verregaande trouweloosheid op een tijdstip, dat het *Nederlandsch-Indisch* Gouvernement met de meest welwillende bedoelingen zich in nadere verbinding met *Atjeh* heeft gesteld;

dat de Sultan van *Atjeh*, deswege nadrukkelijk om opheldering gevraagd, eerst bij het schrijven van Kommissaris van den 22sten deser, en daarna bij dat van 24 daaraanvolgende, niet alleen geheel in gebreke is gebleven, die te verschaffen, maar zelfs de tegen hem ingebragte grieven niet heeft weersproken en daarenboven er toe is overgegaan, zich zoo in het ooglopend mogelijk ten strijde toe te rusten, dat daaraan geen andere beteekenis kan worden toegekend, dan dat *Atjeh* het Gouvernement, van *Nederlandsch-Indië* moedwillig heeft gehoond, en zich op het daardoor ingenomen vijandig standpunt wenscht te handhaven;

dat de bestuurders van dat rijk zich daardoor hebben schuldig gemaakt aan schennis van het tusschen hetzelfde en het *Nederlandsch-Indisch* Gouvernement op den 30sten Maart 1857 gesloten traktaat van handel, vrede en vriendschap, en het misdien overtuigend is gebleken, dat geen staat kan worden gemaakt op de goede trouw van die bestuurders; dat het der Regering van *Nederlandsch-Indië* onder deze omstandigheden niet langer mogelijk is, zonder krachtdadige middelen, een noo-wel door het algemeen handelsbelang als de rischen van hare eigene veiligheid in noordelijk *Sawatra* gevorderden staat van zaken te waarborgen;

Verklaart uit kracht van de magt en bevoegdheid, aan hem door de Regering van *Nederlandsch-Indië* verleend, in naam van die Regering, den oorlog aan den Sultan van *Atjeh*, waarvan hij overigens bij dat manifest mededeeling doet aan elk, wien zulks mogt aangaan, en oen iegelijk aandachtig maakt aan alle mogelijke daaruit voortvloeiende gevolgen en aan de verplichtingen, welke in oorlogtijd op iederen burger van den Staat rusten.

Gedaan aan boord van Zijner Majesteits stoomschip *Citadel van Antwerpen*, liggende voor *Groot-Atjeh*, op heden, Woensdag den 26sten Maart 1873.

NIEUWENHUIZEN.

BATAVIA. TER LANDS-DRUKKERIJ.















diduduki tentara Belanda. Kuta Musapi yang telah ditinggalkan oleh tentara Aceh berhasil diduduki.

Dalam pengulasan Belanda adalah jelas bahwa sesungguhnya perlawanan Aceh bukan hanya di bagian Aceh Besar saja, melainkan daerah rantaunya seperti di Pidie, pantai utara dan timur, serta pantai barat dan selatan Kerajaan Aceh tidak kurang hebat persiapannya. Dalam menghadapi daerah-daerah ini Belanda memakai dua cara yaitu: pertama, menghancurkan kampung-kampung dan pelabuhan dengan tembakan meriam-meriam kapal yang mengepung pantai Aceh dengan ketat. Kedua, menjalankan siasat pecah belah, mengangkat orang-orang yang bisa diperalat untuk menjadi kepala-kepala mukim, *Uleebalang* dan sebagainya.

Tatkala memulai serangannya yang pertama, Belanda sudah merencanakan pengguntungan yang aktif dengan jalan menggunakan pantai Pidie sebagai pangkalan menerobos dari timur ke utara. Subsersif yang telah dilakukan beberapa tahun lampau telah memeberinya harapan untuk menduduki pelabuhan Pidie. Mengenai kegiatan di pantai timur, semenjak Belanda berhasil mematahkan kekuatan Aceh di Pulau Kampai, Belanda telah mencoba menerobos ke Aceh Timur, melalui Tamjang. Tetapi Belanda tidak berhasil. Itulah sebabnya dimulainya suatu taktik dengan jalan menggunakan pelabuhan Pidie sebagai pangkalan masuk. Sehubungan dengan ini, Belanda disamping mengadakan blockade, juga menembaki pantai-pantai. Semenjak tahun 1871, Belanda sudah



Belanda pada tahun 1840 mengirimkan pasukannya, dibawah pimpinan Kolonel A.V. Mischiels, untuk mengusir pasukan-pasukan Aceh. Dalam pertempuran ini Aceh dapat dikalahkan. Akibat tindakan Belanda ini kapal-kapal dagang Eropa tidaklah mendapat sambutan yang semestinya sehingga tidaklah aman bagi kapal-kapal dagang itu untuk memasuki pelabuhan-pelabuhan Aceh. Khawatir akan adanya usaha Negara lain mencari pengaruh di Aceh, pemerintah Hindia Belanda berusaha mengadakan hubungan dengan Sultan Aceh.

Akhirnya pada tahun 1857 Mayor Jendral van Swieten berhasil menandatangani perjanjian persahabatan dan perdamaian dengan Sultan Aceh. Isi pokok perjanjian itu antara lain:

1. Membolehkan kawula kedua pihak, dengan mengindahkan undang-undang yang berlaku, untuk melawat, bertempattinggal dan menjalankan perdagangan dan pelayaran di daerah kedua belah pihak.
2. Kedua pihak melepaskan tuntutan masing-masing mengenai segala pertikaian yang timbul sebelum perjanjian ini.
3. Semufakat untuk mencegah dengan sekuat-kuatnya perompakan dan penangkapan manusia untuk dijual dan pembajakan dipantai didaerah masing-masing.
4. Sultan Aceh mengakui bahwa Gubernur Jendral Hindia Belanda diwakili oleh Gubernur Belanda di Sumatera Barat dalam hal urusan dengan Sultan Aceh



Kesetiaan raja-raja dan rakyat kepada Sultan tetap besar. Pasukan-pasukan Aceh dipimpin oleh Tuanku Hasyim, salah seorang anggota keluarga Sultan yang ketika serangan Belanda pertama berangsur, masih berada di Sumatera Timur. Beliau dibantu oleh T. Imum Leung Bata dan T. Nanta Setia. Setelah delapan hari mempertahankan pantai kemudian terpaksa mengundurkan diri. Tuanku Hasyim mengatur pertahanan Masjid raya serta memperkuat kubu pertahanan di Peukan Aceh dan Lambhuk.

Berdasarkan ketentuan itu pernah dibuat perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Aceh pada tahun 1857 yang berisikan kerjasama perdagangan dan kerjasama keamanan yang kedudukannya sama dengan dua negara yang bersahabat. Perjanjian itu disahkan oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda dan kemudian juga mendapat pengesahan Staten General kenyataan kemudian, bahwa sesudah berjalan 16 tahun Pemerintah Hindia Belanda atas persetujuan menteri jajahan yang waktu itu dipangku oleh Fransen van De Putte bermaksud mengadakan hubungan baru dengan Aceh dengan tujuan memperkuat kedudukannya di Aceh dalam bentuk yang lebih baik bagi pemerintah Hindia Belanda. Menurut Regeringsreglement 1855 itu telah diatur berbagai hubungan dengan negeri-negeri di Indonesia yang dapat dikategorikan atas tiga tingkatan, yaitu:











1941 di Lamnyong pada malam hari.<sup>23</sup> Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat baik dari kalangan Ulama maupun kalangan Adat (Uleebalanag). Diantaranya dapat disebutkan Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Tengku Abdul Wahab Seuliman yang mewakili Persatuan Ulama Seluruh Rakyat Aceh (PUSA), Teuku Nyak Arif (Panglima Sagi XXVI Mukim), Teuku Panglima Polem Muhammad Ali (Panglima Sagi XXII Mukim), Teuku Ahmad (Uleebalang) yang mewakili kalangan adat Uleebalang. Suatu keputusan penting yang mereka ambil yaitu dikeluarkannya sebuah pernyataan Sumpah Setia mereka kepada Agama Islam, Bangsa dan Tanah Air serta menyusun pemberontakan bersama melawan Belanda bekerja sama dengan Dai Nippon yang mengatasnamakan PUSA.<sup>24</sup>

Dalam pertempuran, Teuku Nyak Arif secara tegas mengemukakan kepada Residen Belanda agar pemerintahan diserahkan terimakan ketangan rakyat Aceh sendiri untuk dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Selanjutnya Teuku Nyak Arif juga mengemukakan bahwa rakyat Aceh akan mampu mempertahankan tanah airnya dan dapat membela diri sendiri setiap ancaman yang datang dari luar, jika seandainya pemerintah Belanda mengalihkan kekuasaan pemerintahan kepada rakyat. Tuntutan ini ternyata ditolak oleh Residen Belanda (Paw) pada tanggal 30 September dan sejak saat itu Teuku

---

<sup>23</sup> Hasan Saleh *Mengapa Aceh Bergolak Bertarung Untuk Kepentingan Bangsa Dan Bersabung Untuk Kepentingan Daerah* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1992), 19.

<sup>24</sup> M. Joenoes Jamil *Riwayat Barisan "F" Fujiwaea Kikan di Aceh* (Banda Aceh: Pusat Ilmu Sosial, 1975), 4-5.











